KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP WASIAT WAJIBAH DALAM WARIS BEDA KEYAKINAN DAN HARTA BERSAMA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 16/K/Ag/2010 PENGADILAN MAKASSAR

Musdalifah Azahra¹, Putri Pinasti², Meidina Aulia³, Deliana Rinasari Ghufriani⁴, Dwi Desi Yai Tarina⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2210611025@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611027@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611326@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611356@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁵

ABSTRACT; *This research examines the application of wasiat wajibah as a solution in the distribution of inheritance between interfaith couples according to civil law. Using a normative juridical approach based on the analysis of court decisions, this research finds that judges can use wasiat wajibah to transfer a portion of the inheritance to a non-Muslim wife who has been married to a Muslim husband for 18 years. This decision opens up opportunities for recognition of inheritance rights for interfaith couples outside the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPPer). KHI explicitly excludes non-Muslims as heirs to a Muslim's estate, while KUHPPerdata does not explicitly prohibit interfaith inheritance, although in practice it is often rejected on the grounds of religious law. However, jurisprudential developments in Indonesia show a shift by considering the principles of justice and human rights. This decision is an important breakthrough in enriching the understanding of inheritance law and offering an innovative approach to guarantee the rights of interfaith couples.*

Keywords: *Wasiat Wajibah, Interfaith Inheritance, And Jurisprudence.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji penerapan wasiat wajibah sebagai solusi dalam pembagian waris antara pasangan beda agama menurut hukum perdata. Dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada analisis putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa hakim dapat menggunakan wasiat wajibah untuk mengalihkan sebagian harta warisan kepada istri non-Muslim yang telah menikah selama 18 tahun dengan suami Muslim. Putusan ini membuka peluang pengakuan hak waris bagi pasangan berbeda agama di luar ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer). KHI secara jelas mengecualikan non-Muslim sebagai ahli waris dari harta seorang Muslim, sementara KUHPPerdata tidak secara tegas melarang waris beda agama meskipun dalam praktik sering ditolak dengan alasan hukum agama. Namun, perkembangan yurisprudensi di Indonesia menunjukkan pergeseran dengan mempertimbangkan asas keadilan dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Putusan ini menjadi terobosan penting dalam memperkaya pemahaman hukum

waris sekaligus menawarkan pendekatan inovatif untuk menjamin hak pasangan beda agama.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Waris Beda Agama Dan Yurisprudensi.

PENDAHULUAN

Waris adalah suatu peninggalan harta benda yang diturunkan dari ahli waris kepada pewaris. Waris merupakan perpindahan harta benda dari seseorang yang sudah wafat kepada orang lain. Kekayaan yang dimaksud dapat berupa benda yang dapat dipindahkan dan juga benda tidak dapat dipindahkan. Di dalam hukum perdata, terdapat tiga hal unsur utama dalam pewarisan. Yang pertama adalah pewaris, kedua adalah ahli waris, dan yang ketiga adalah harta benda yang diwariskan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa cara untuk mewaris, antara lain adalah hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris perdata.¹ Hukum waris islam adalah ketentuan pewarisan yang mengatur perpindahan waris berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ulama. Hukum waris adat merupakan hukum pembagian warisan yang berasal dari kebiasaan dan tradisi yang telah diatur secara turun temurun. Sementara itu, hukum waris perdata ialah hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang secara khusus telah diatur pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130.²

Di dalam hukum waris perdata, ahli waris terbagi atas empat golongan. Kelompok pertama (anak, suami/istri dari pewaris), Kelompok kedua (Ayah, Ibu, dan saudara pewaris), Kelompok ketiga (Kerabat lain dalam garis keturunan), Kelompok empat (Keluarga jauh ataupun pihak lain yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang). Di dalam hukum waris perdata, tiap-tiap ahli waris mendapatkan pembagian harta yang adil, baik pria maupun wanita. Apabila pewaris tidak membentuk surat wasiat, maka dari itu pembagian warisan akan dibagi terlebih dahulu kepada golongan satu pewaris. Terdapat dua pembagian warisan menurut KUHPerdata yaitu waris ab intestato dan waris testmentair. Waris ab intestato adalah pewarisan

¹ Dika Ratu Marfu'atun, dkk. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Volume. 1 No.4 Agustus 2024

² Rahmat Haniru. Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* Volume 04, Nomor 02, Desember 2014

tanpa surat wasiat, hanya mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku. Waris testamentair adalah waris pewarisan berdasarkan surat wasiat yang dibentuk oleh ahli waris.³

Sementara itu di dalam kewarisan islam, terdapat wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu keadaan dimana seorang pewaris tidak secara jelas menuliskan siapa ahli warisnya. Sehingga terdapat beberapa pihak yang berhak untuk menerima warisan dari sebagian harta pewaris. Ketentuan mengenai wasiat wajibah baru muncul di pertama kali di Peraturan Perdata Mesir. Seperti contohnya di dalam Peraturan Perdata Mesir, sudah diatur kebijakan wasiat wajibah yang ditujukan untuk para keturunan ketiga dari para anak yang telah wafat terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia, sehingga tidak layak menerima warisan menurut ketentuan hukum pewarisan Islam karena terhalang oleh keberadaan paman. Jika dibandingkan dengan wasiat wajibah di negara-negara lainnya dalam negara Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat wajibah lebih ditujukan kepada anak angkat dan orang tua asuh yang mengangkat. Di dalam pewarisan anak adopsi mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dengan anak biologis dalam hal menerima warisan.⁴

Sejak berlangsungnya suatu perkawinan, terkait kebendaan atas suatu harta dan benda yang didapatkan selama pernikahan merupakan kepemilikan dan hak bersama-sama antara kedua pasangan suami istri tersebut sepanjang tidak ditetapkan lain dalam perjanjian pernikahan. Dalam hal ini pasangan tersebutlah yang menentukan terkait harta kekayaan yang didapatkan selama berlangsungnya pernikahan entah itu pemisahan harta pribadi maupun sistem harta gabungan. Sepanjang perkawinan berlangsung hingga putusannya ikatan perkawinan baik karena kematian maupun akibat perceraian menimbulkan akibat hukum yaitu harta bersama. Mengacu pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta kekayaan berupa uang ataupun benda yang didapatkan selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama sedangkan pengaturan dalam KUHPerdato diatur dalam Pasal 128-129 KUHPerdato yang menyebutkan setelah berakhirnya hubungan pernikahan, antara pasangan suami dan istri maka kekayaan bersama itu dipisah dua bagian antara suami istri.

³ Dwi Ratna Kartikawati. Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam. Tasikmalaya. 2021. Hal 5

⁴ Khotifatul Defi Nofitasari, Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya), *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (2021)

Persoalan mengenai harta bersama seringkali menjadi masalah kompleks dan rumit disebabkan karena masing-masing pihak menganggap lebih berkontribusi atas harta dan benda tersebut.⁵ Adapun dalam beberapa praktik, permasalahan yang terjadi juga menjadi kompleks karena dalam perkawinan tersebut antara suami dan istri memiliki perbedaan agama. Penyelesaian dalam pemisahan harta bersama terkait pernikahan beda keyakinan masih belum ada ketentuan jelas yang mengaturnya akan mengikuti agama istri ataupun agama suami. Persoalan harta bersama dalam perkawinan beda keyakinan, dikarenakan pendaftaran perkawinannya dilakukan oleh kantor catatan sipil dan ditetapkan melalui pengadilan, maka terkait pembagian harta bersama dapat diajukan gugatan pembagian harta bersama melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Terhadap persoalan Harta dari perkawinan beda agama salah satunya terjadi pada kasus pernikahan oleh Evie Lany yang beragama kristiani dengan Muhammad Armaya yang beragama muslim dalam putusan Nomor 732/Pdt.G/PA.Mks. pada perkara ini keluarga suami dari Tergugat telah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Makassar karena harta peninggalan suami tergugat masih dalam penguasaan istri (tergugat). Namun demikian, selama proses berlangsungnya persidangan, Tergugat merasa tidak puas mengenai perolehan pembagian harta bersama dan hak waris yang tidak dijatuhkan kepadanya berdasarkan penetapan pengadilan. Oleh karena itu Tergugat mengajukan banding dengan putusan Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks yang pada intinya menguatkan putusan PA Makassar. Akan tetapi PA makassar dalam pertimbangannya menerapkan asas personalitas keislaman untuk memenuhi rasa keadilan bagi keduanya antara penggugat dengan tergugat dan menyerahkan kepunyaan waris kepada Tergugat melewati wasiat wajibah.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat yaitu :

- Bagaimana penyelesaian kasus dengan waris beda keyakinan dengan wasiat wajibah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Putusan Nomor 16/k/Ag/2010?
- Bagaimana analisis hakim dalam Putusan Nomor 16/k/Ag/2010 mempengaruhi pengembangan regulasi perdata Indonesia dalam konteks kasus waris beda agama dan harta bersama?

⁵ Nada Putri Rohana, Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 1 Juni 2021

Tujuan

- Menganalisis hubungan antara wasiat wajibah dan hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus waris beda agama dan harta bersama, serta implikasinya terhadap sistem hukum perdata di Indonesia.
- Mengidentifikasi dan mengkaji pengaruh Putusan Nomor 16/K/Ag/2010 terhadap perkembangan hukum perdata Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus waris beda agama dan pembagian harta bersama.

Manfaat

- Manfaat Teoritis
 1. Mengembangkan teori hukum waris;
 2. Mengkaji hukum wasiat wajibah dalam hukum waris dengan hukum perdata Indonesia;
 3. Mengkaji Putusan Nomor 16/K/Ag/2010 dari sudut pandang hukum waris Islam serta hukum perdata Indonesia.
- Manfaat Praktis
 - 1) Membantu memberikan pemahaman bagi pasangan beda keyakinan dalam hal penyelesaian sengketa waris beda agama menurut hukum waris agama islam dan hukum perdata;
 - 2) Menjadikan referensi bagi notaris, hakim, dan pengacara dalam melibatkan kasus pasangan beda agama

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis isi, yang mana datanya diperoleh melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Di dalam artikel ilmiah ini juga memanfaatkan metode kepustakaan (*library research*) yang melibatkan analisis dan pengkajian dari sumber-sumber tertulis yang relevan.

Dalam artikel ilmiah ini, sumber-sumber data yang digunakan meliputi buku-buku, artikel jurnal dan sumber-sumber online lainnya. Metode ini memungkinkan penulis untuk dapat memahami lebih dalam topik penelitian melalui analisis literatur yang luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Kasus Dengan Waris Beda Agama Dengan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Pengadilan Agama Putusan Nomor 16/k/Ag/2010

Di Indonesia, pengaturan mengenai wasiat islam hanya diatur secara jelas di Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI juga turut mengatur terkait wasiat wajibah, tetapi tidak mendefinisikan secara jelas apa arti dari wasiat wajibah. Wasiat wajibah dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk memberikan wasiat wajib kepada seseorang. Di dalam KHI aturan mengenai wasiat wajib berbeda dengan aturan wasiat wajib negara lainnya. Di dalam KHI aturan ini hanya mengatur terbatas pada orang tua angkat yang telah wafat wajib memberikan wasiat wajibah pada anak angkatnya, begitupun sebaliknya anak angkat yang meninggal dunia wajib memberikan wasiat wajibah kepada orang tua angkatnya. Namun dalam praktiknya, penerima wasiat wajibah kini telah berkembang menjadi pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat, serta kepada ahli waris yang bukan beragama islam.⁶

Di dalam wasiat wajibah, besaran hak maksimal penerima wasiat adalah sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta waris. Dalam Pasal 201 KHI, menegaskan bahwa penerima wasiat wajibah tidak diperbolehkan lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian. *“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”*

Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa harta yang diperoleh si penerima wasiat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dan apabila wasiat melebihi ketentuan tersebut, maka harus dimintakan persetujuan oleh pihak keluarga yang lainnya. Apabila terdapat anggota keluarga yang tidak setuju maka harta akan dibatasi sebesar $\frac{1}{3}$ saja.⁷

Pada dasarnya dalam agama islam terdapat syarat keharusan beragama islam dalam membagi para ahli waris. Hal tersebut pun sudah menjadi kesepakatan ulama fikih, apabila adanya perbedaan agama menjadi salah satu penyebab terhalangnya suatu warisan. Hal

⁶ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab. Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum*. Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, Halaman 311 - 329

⁷ Siti Intan Sekarieva, Djanuardi, dan Hazar Kusmayanti. Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Minangkabau. *Jurnal Normative* Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

tersebut juga berlaku sebaliknya, ahli waris dengan agama islam tidak dapat menerima warisan dari pewaris yang bukan muslim. Ketentuan ini kemudian telah dianut oleh banyak ulama, yang mengacu pada:

1. Pembagian Waris dalam Islam tidak memperbolehkan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya diperbolehkan apabila dilakukan melalui hibah, wasiat dan hadiah.⁸

Pembagian waris islam apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris biasanya menimbulkan permasalahan dalam pembagian harta peninggalan. Namun, upaya pemberian perlindungan kepada ahli waris yang berbeda agama, dalam hukum islam mengenal konsep wasiat wajibah.⁹ Pewarisan melalui wasiat wajibah adalah pemberian hak waris yang tidak dapat secara langsung mewarisi karena adanya penghalang perbedaan agama. Dalam kasus pewarisan beda agama yang terjadi pada Ir. Muhammad Armaya bin Renreng (almarhum) beragama Islam dan istrinya, Evie Lany Mosinta, yang beragama Kristen, terjadi sengketa waris setelah almarhum meninggal dunia pada 22 Mei 2008.

Dilakukannya wasiat wajibah telah diakui dalam beberapa putusan pengadilan, salah satunya pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 16/k/Ag/2010. Penelusuran perkara pada kasus tersebut sudah melalui pengadilan tingkat pertama dengan register perkara Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks sampai dengan tingkat banding dengan nomor perkara 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar. Dikarenakan tergugat (Evie Lany) belum merasa terpenuhi atas haknya atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka tergugat melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 September 2009.

Berdasarkan hukum waris islam, Evie Lany Mosinta tidak dapat dijadikan ahli waris karena agama yang berbeda. Menurut hukum waris Islam, ahli waris yang beragama non-islam sedangkan pewarisnya beragama islam, maka tidak berhak mewarisi, sebagaimana ditentukan

⁸ H. Asmu'i Syarkowi. (2025, 15 April Selasa). *Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris, Masih Urgenkah?* Diambil kembali dari publikasi pengadilan Pengadilan Agama Semarang: <https://pa-semarang.go.id/id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/9546-perbedaan-agama-sebagai-penghalang-waris-masih-urgenkah>

⁹ Moh.Sukran R.Labone "Pemberian Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/Ag/2010)". *Tadulako Master Law Jurnalnya Vol 4 Issue 1, Februari 2020*

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171. Maka dari itu, persoalan penyebab terjadinya sengketa karena sang istri beragama kristen. Oleh karena itu, terjadi sengketa ahli waris dengan gugatan waris yang diajukan oleh ibu kandung dari pewaris beserta saudara kandungnya pewaris yaitu Muhammad Armaya bin Renreng. Dengan pada dalilnya bahwa ahli waris Muhammad Armaya, merupakan ibu kandung (Halimah Daeng Baji) dan empat saudara kandung (Murnihati binti Renreng, Muliyahati binti Renreng, Djelintahati binti Renreng, dan Arsal bin Renreng). Para penggugat bersikukuh terkait separuh harta yang sedang dalam penguasaan tergugat adalah bagian pewaris dan hak para ahli warisnya penggugat.

Penyelesaian kasus ini akhirnya memberikan keadilan bagi Evie pada tingkat kasasi dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi Evie Lany Mosinta dan menyatakan kalau tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama sebagai bagian dari haknya atas harta bersama selama perkawinan, sedangkan bagian lainnya ditetapkan sebagai harta warisan yang menjadi hak dari para ahli waris sah.

Oleh karena itu pada kasus ini menerapkan wasiat wajibah untuk memberikan solusi pada pewarisan beda agama. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menerapkan prinsip wasiat wajibah sebagai bentuk rekonstruksi hukum waris Islam untuk menjawab realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural¹⁰. Wasiat wajibah menjadi solusi yuridis untuk menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang tidak dapat mewarisi secara langsung akibat perbedaan agama, namun memiliki hubungan pernikahan yang sah dan kontribusi selama masa perkawinan

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 16/k/Ag/2010 mempengaruhi pengembangan hukum perdata Indonesia dalam konteks kasus waris beda agama dan harta bersama

Pertimbangan hakim adalah cara berpikir serta menganalisis suatu perkara yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Pertimbangan hakim mengikuti serta bukti, penerapan hukum dan penimbangan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hakim pun dalam memberikan putusan pengadilan tidak mungkin tanpa pertimbangan yang jelas. Tujuan hakim dalam memberikan keputusan adalah agar hasil tersebut dapat menghadirkan keadilan bagi semua pihak sekaligus menyelesaikan perkara dengan cara yang efektif dan efisien.

¹⁰ Azmi Zamroni Ahmad, Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid asy-Syari'ah Jasser Auda, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 52, No.1, Juni 2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 sangat berkontribusi dalam perkembangan penting dalam hukum perdata Indonesia terkait kasus harta bersama dan waris beda agama. Kasus tersebut melibatkan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng yang menganut Islam, dan Evie Lany Mosinta yang menganut Kristen, yang menikah selama 18 tahun tanpa memiliki anak. Setelah kematian suaminya, mulai muncul konflik mengenai hak waris antara istri dan keluarga almarhum.¹¹

Dalam putusan ini, hakim berusaha menemukan jalan keluar yang seimbang dan adil untuk kondisi di mana hukum waris Islam secara resmi tidak memperbolehkan seorang istri non-Muslim untuk menerima warisan dari suaminya yang beragama Islam. Oleh karena itu dalam konteks ini, hakim memanfaatkan mekanisme wasiat wajibah untuk memberikan hak waris kepada istri non-muslim di kasus ini. Ini menandai pergeseran mendalam dalam pemahaman hukum waris di Indonesia, yang sebelumnya lebih condong untuk mengesampingkan hak-hak ahli waris yang tidak beragama Islam berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c, yang menyatakan bahwa hanya individu yang beragama Islam yang berhak menerima warisan.¹²

Pertimbangan yang mendasari keputusan ini mencakup lamanya pernikahan yang berlangsung selama 18 tahun sebagai bentuk komitmen istri, serta asas keadilan substantif yang menekankan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta aspek kemanusiaan. Hakim memanfaatkan wasiat wajibah sebagai alat hukum untuk mengakomodasi hak istri yang bukan Muslim terhadap warisan suaminya yang beragama Islam, meskipun secara resmi terhalang oleh perbedaan agama menurut hukum waris Islam.¹³ Mekanisme ini menandakan adanya pengakuan terhadap peran sosial dan emosional yang diberikan oleh istri dalam kehidupan berkeluarga, meskipun ada perbedaan dalam keyakinan. Oleh karena itu, keputusan ini tidak hanya memperhatikan aspek hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas.

¹¹ Ahmatnjar. "Sisi Lain Dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/Ag/2010 Tentang Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Kewarisan Beda Agama; Kajian Dari Aspek Status Perkawinan Dan Wasiat Wajibah". *Jurnal El-Qanuny*. Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019.

¹² Irine Dian Ayu Dewanty. Skripsi: "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam". (Malang, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan, 2015). Hal. 15.

¹³ Rizky Fitri Ananda Hariyanto, dkk. "Pembagian Waris Pada Pasangan Suami Istri Beda Agama Menurut Perspektif KUHPerdara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Ag/2010)". *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanitie*. Vol. 4No. 2. 2024: 21-27

Persoalan mengenai posisi ahli waris yang bukan Muslim sudah sering dibahas oleh para ulama, salah satunya oleh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau berpendapat bahwa individu non-Muslim yang berinteraksi secara damai dengan umat Islam tidak seharusnya dianggap sebagai kafir harbi (orang kafir yang memerangi Islam). Ini juga relevan bagi Pemohon Kasasi, yang selama hidup pewaris telah menjalin hubungan yang harmonis dan rukun meskipun memiliki keyakinan yang berbeda.

Pertimbangan itu didasarkan pada hadis yang menyebutkan bahwa harta seorang Muslim tidak boleh diberikan kepada non-Muslim, karena memberikan warisan kepada mereka berpotensi memperkuat posisi ekonomi non-Muslim sekaligus melemahkan umat Islam. Meskipun ada pihak yang sebenarnya layak menerima warisan, faktor perbedaan agama dapat menjadi penghalang. Sejalan dengan prinsip ini, Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/9/2005 menekankan bahwa dalam hukum waris dalam Islam tidak ada pengakuan hak untuk mewarisi di antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Dengan adanya Putusan Pengadilan Nomor 16/k/Ag/2010 membuka peluang pengakuan dalam hal waris untuk pasangan beda agama di luar aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Atas pertimbangan hakim terkait pembagian harta bersama pihak istri mendapatkan keadilan dan kesesuaian sesuai dengan keinginannya, dan diharapkan dengan adanya Putusan ini kedepannya untuk tidak ada lagi kendala pembagian warisan walaupun terdapat pihak yang berbeda kepercayaan antar satu lain.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 menjadi tonggak penting dalam evolusi hukum perdata Indonesia, khususnya terkait warisan lintas agama, dengan membuka peluang pengakuan hak waris bagi pasangan non-Muslim dan memberikan dampak signifikan pada pemahaman hukum waris di Indonesia. Dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010, Indonesia telah mengambil langkah maju dalam mengakui hak waris pasangan beda agama dan memperkaya perkembangan hukum perdata Indonesia. Agar pasangan beda agama mendapatkan hak waris yang seharusnya.

Putusan Mahkamah Agung dengan nomor 16/K/AG/2010 mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam pembaruan hukum, di mana hakim menunjukkan keberanian dan fleksibilitas dalam menafsirkan hukum berdasarkan konteks. Hakim berusaha mengintegrasikan aspek-aspek normatif dan sosial agar bisa mencapai keadilan yang substansial. Keputusan ini juga membuka jalan bagi reformulasi hukum supaya lebih inklusif dan selaras dengan kenyataan

masyarakat multikultural Indonesia, terutama dalam hal hak waris untuk pasangan dengan agama yang berbeda.

Selain itu, keputusan ini memiliki potensi untuk menjadi yurisprudensi yang bisa dijadikan acuan dalam kasus-kasus serupa, yang akan menciptakan konsistensi hukum dan memberikan perlindungan bagi mereka yang terpinggirkan karena perbedaan keyakinan. Dengan adanya keputusan ini, tersampaikan bahwa hukum di Indonesia berpotensi untuk berkembang ke arah yang lebih berorientasi pada kemanusiaan. Keterampilan hakim dalam memahami nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial juga menunjukkan betapa pentingnya pendekatan hukum yang dapat beradaptasi dalam masyarakat yang beragama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung dengan nomor 16/K/Ag/2010 terkait penyelesaian warisan beda agama melalui penerapan wasiat wajibah menunjukkan bahwa hukum berkembang sejalan dengan keragaman masyarakat Indonesia. Dalam sengketa antara Evie Lany Mosinta dan keluarga almarhum Muhammad Armaya, Mahkamah Agung memberikan solusi hukum yang mengakui hak istri non-Muslim atas setengah dari harta bersama, melambangkan keadilan, meskipun secara hukum Islam ia tidak diakui sebagai ahli waris. Pendekatan ini membuktikan bahwa wasiat wajibah dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak individu yang terhalang oleh norma agama, tetapi memiliki kontribusi yang signifikan pada kehidupan pewaris.

Selain itu, keputusan ini berpotensi menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan dalam kasus-kasus serupa, menciptakan konsistensi hukum serta perlindungan bagi pihak-pihak yang rentan karena perbedaan kepercayaan. Keberadaan putusan ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia berpotensi berkembang ke arah yang lebih manusiawi. Kepekaan hakim terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial memberikan contoh nyata mengenai pentingnya pendekatan hukum yang responsif dalam masyarakat yang beragama.

Saran

Dalam konteks penyelesaian masalah waris beda agama, beberapa langkah inovatif dapat dipertimbangkan. Pertama, wasiat wajibah dapat dijadikan solusi untuk menjamin hak waris pasangan beda agama, sehingga sosialisasi dan edukasi mengenai hal ini perlu ditingkatkan di masyarakat. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya meninjau kembali peraturan

yang berlaku, termasuk memperbarui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar lebih mengakomodasi hak waris pasangan beda agama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 juga dapat dijadikan landasan bagi pengembangan hukum perdata Indonesia, khususnya terkait warisan lintas agama, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam mengenai implikasinya. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi tentang hak waris dan pentingnya perencanaan warisan guna mencegah sengketa di kemudian hari. Terakhir, pemerintah harus memastikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak waris pasangan beda agama dengan memperbarui peraturan dan prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmatnizar. (Juli-Desember 2019). Sisi Lain Dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/Ag/2010 Tentang Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Kewarisan Beda Agama; Kajian Dari Aspek Status Perkawinan Dan Wasiat Wajibah. *Jurnal El-Qanuny*, Volume 5 Nomor 2.
- Azmi Zamroni Ahmad. (Juni 2018). Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāsid asy-Syarī'ah Jasser Auda. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 52, No.1.
- Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarna. (Juni 2010). Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. *Mimba Hukum*, Volume 22, Nomor 2. Halaman 311 - 329.
- Dika Ratu Marfu'atun, dkk. (Agustus 2024). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume. 1 No.4*, Volume. 1 No.4.
- Dwi Ratna Kartikawati. (2021 hal 5). *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Tasikmalaya.
- H. Asmu'i Syarkowi. (2025, 15 April Selasa). *Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris, Masih Urgenkah?* Diambil kembali dari publikasi pengadilan Pengadilan Agama Semarang: <https://pa-semarang.go.id/id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/9546-perbedaan-agama-sebagai-penghalang-waris-masih-urgenkah>
- Irine Dian Ayu Dewanty. (2015). Skripsi: "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama

- Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam". *Malang, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan*, hal,15.
- Khotifatul Defi Nofitasari. (2021). Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya). *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2.
- Moh.Sukran R.Labone. (Februari 2020). Pemberian Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/Ag/2010). *Tadulako Master Law Journal* , Vol 4 Issue 1.
- Nada Putri Rohana. (Juni 2021). Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7 No. 1.
- Rahmat Haniru. (Volume 04, Nomor 02,). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama. The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 04, Nomor 02,*.
- Rizkya Fitri Ananda Hariyanto, dkk. (2024). Pembagian Waris Pada Pasangan Suami Istri Beda Agama Menurut Perspektif KUHPerdara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Ag/2010). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanitie*, Vol. 4No. 2 hal : 21-27.
- Siti Intan Sekarieva, Djanuardi, Dan Hazar Kusmaya. (2020). Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Minangkabau. *Jurnal Normative*, Volume 8 Nomor 2, Issn : 1907-5820 E-Issn : 2620-8202.